

ABSTRAK

Lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah. Perubahan pedagang kaki lima yang awalnya pedagang menggunakan terpal seadanya hingga menggunakan roda, namun kini PKL sudah menggunakan mobil sebagai sarana berdagang mereka atau disebut sebagai mobil toko. Mobil toko berarti mobil yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat menjual barang (makanan, majalah, koran, dan sebagainya), biasanya berkeliling di kawasan permukiman atau berhenti di suatu lokasi keberadaan PKL (mobil toko) tersebut juga dapat menimbulkan kemacetan karena mereka menjalankan usahanya di dalam mobil yang di parkir sembarangan di pinggir jalan. Penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (mobil Toko) dan mengetahui tentang peran pemerintah daerah Kota Bandung terhadap masalah mobil toko.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Tahapan dalam pembuatan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja dan para PKL (mobil toko). Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada

Hasil dari pembahasan menunjukkan Saat ini pemberdayaan PKL (mobil toko) masih menggunakan asas legalitas sepenuh yang pada prakteknya tidak sesuai bila di hubungkan dengan kasus PKL (mobil toko). Perlu adanya pendekan kepada para PKL (mobil toko) untuk mendapatkan solusi terbaik agar hak dan kewajiban para PKL (mobil toko). Dalam pelaksanaan PERDA nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan kota Bandung, PKL (mobil toko) masih belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL (mobil toko) disepanjang jl. Diponegoro yang merupakan zona merah dimana tidak boleh ada aktivitas berdagang di kawasan tersebut.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, Peran

ABSTRACT

Lack of supervision and city spatial have been sealed which is hard for shifts the productive land (this form of agriculture have) in order to construction of buildings .This is what causes the why do some people opt to work to be street vendors .Their survival are a foot of five (street vendors) is also considered to disturb traffic or because it is located in the outskirts of a road or sidewalk. They were thought to be the cause of the traffic jam and foulness .To the inflation rate although on the other hand street vendor (street vendors) is frequently visited by him on the back for the prices offered are relatively cheap .Of Changes in street vendors who originally traded using makeshift tarps to use carts, but now the areas deliver the personnel had a suicide vehicle borne improvised as a means of black and caspian seas traded they or divide so called as the car a shop. The car shop means a car that is designed in such a way so that it can be used as a sell its merchandise (food , magazine , a newspaper , and , usually will go around a residential compound or stop in a the existence of street vendors (driving a car shop assistants) was also it could cause congestion because they menjalakan the business in in an automobile that in park carelessly in the side of the road .This research to know about implementation of local regulations of the city of bandung number 4 2011 concerning the arrangement of and guidance street vendors (driving a car shop assistants) and he knows about the role of the regional government of the city of bandung on the problem of the car shop .

A method of the research was conducted by the use of research methodology descriptive of by the use of secondary data .An important stage in the manufacture of a thesis this was done in the manner of the study of literature that and study of the field with how to do the interview to a member of public order police officer squad praja and the street vendors (the car a shop) .Specification research in a thesis this is descriptive of it is anticipated that analysis , pt pgn promised to supply went on to describe the hours of the day in an unerring manner and analyzes problems that had occurred based on the regulation of perundang-undangan to be relevant and can form teori-teori new or supported a theory that had been prepared in.

The results of this discussion of express its strongest at the present time of empowerment of the program street vendors (the car a shop) still use the principle of both legal entities such may pay a whole who there is not even practically in accordance on increasing if in jakarta have joined with the case of street vendors (the car a shop) .Bi deputy governor muliaman d pendekan to the street vendors (the car a shop) to get the best solution so that the rights and obligations of the street vendors (the car a shop) .In governor prijanto said the by law no 4 years 2011 concerning the arrangement of and coaching in the city of bandung , street vendors (the car a shop) are still unable to carry out their rights and duties a good land and a this can be seen from are still many the street vendors (the car a shop) jl. diponegoro alongside the degenerative brain malady that is a red zone despite plenty where it does not want to be there the activity of black and caspian seas traded to tennis in the area.

Keywords: Local Government, Local Act, The Role of